

DINAMIKA KONFLIK SOSIAL DALAM PEMINDAHAN IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI KOTA BANJARBARU

ANDIP BIMA FAHRIZA

NPP. 32.0747

Asdaf Kota Banjarbaru , Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 32.0747@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Rossy Lambelanova, AP, S.IP.,M.Si

ABSTRACT

(Problem Statement/Background (GAP): The relocation of the provincial capital from Banjarmasin to Banjarbaru, as mandated by Law No. 8 of 2022, has sparked significant social conflict. Despite the legal legitimacy of the move, the process has created friction among various stakeholders particularly between residents, local elites, and government institutions. These conflicts stem from issues such as unequal access to resources, lack of community involvement in the decision-making process, and disparities in socio-political influence between Banjarbaru and Banjarmasin. The absence of inclusive communication and equitable transition planning has deepened community resistance and fragmented social cohesion. **Purpose:** This study aims to explore the dynamics of social conflict resulting from the relocation of the provincial capital of Banjarbaru City. **Method:** This qualitative descriptive research employs a case study and phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and media reviews, involving key informants such as local government officials, community leaders, and affected residents. The analysis is grounded in Ralf Dahrendorf's (1896). conflict theory, which focuses on authority structures, competing interests, and societal change. **Result:** The findings reveal that the relocation has generated vertical conflicts (between citizens and government) and horizontal conflicts (among community groups). Major inhibiting factors include a lack of community engagement, infrastructural unpreparedness, inter-elite rivalry, and weak socialization mechanisms. In response, Kesbangpol has implemented several strategies such as participatory dialogues, empowerment programs for SMEs, and collaborative policy-making. While these steps have started to mitigate tensions, structural and cultural challenges remain. **Conclusion:** The social conflict arising from the capital relocation reflects deeper socio-political imbalances and governance gaps. Although the conflict is ongoing, proactive engagement by local institutions like Kesbangpol shows potential in fostering reconciliation and ensuring a more inclusive transition.

Keywords: Banjarbaru, Capital Relocation, Community Participation, Political Dynamics, Public Policy, Ralf Dahrendorf, Social Conflict

ABSTRAK

Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah menimbulkan konflik sosial yang signifikan. Meski secara hukum sah, proses pemindahan ini memicu ketegangan antara berbagai kelompok masyarakat, terutama antara warga terdampak, elite lokal, dan institusi pemerintah. Konflik ini muncul akibat ketimpangan akses terhadap sumber daya, kurangnya partisipasi publik dalam proses

pengambilan keputusan, serta perbedaan pengaruh sosial-politik antara Banjarbaru dan Banjarmasin. Ketidakhadiran komunikasi yang inklusif dan perencanaan transisi yang merata memperparah resistensi masyarakat dan melemahkan kohesi sosial. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika konflik sosial akibat pemindahan ibu kota provinsi di Kota Banjarbaru. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus dan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta kajian media, dengan melibatkan informan kunci seperti pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga terdampak. Analisis data menggunakan teori konflik sosial Ralf Dahrendorf (1896) yang berfokus pada struktur otoritas, kepentingan yang bertentangan, dan perubahan sosial.. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik vertikal (antara masyarakat dan pemerintah) dan konflik horizontal (antar kelompok masyarakat). Faktor penghambat utama meliputi minimnya pelibatan masyarakat, ketidaksiapan infrastruktur, rivalitas antar elite, serta lemahnya mekanisme sosialisasi kebijakan. Sebagai respon, Kesbangpol menerapkan strategi seperti dialog partisipatif, pemberdayaan UMKM, serta penyusunan kebijakan kolaboratif. Meskipun strategi tersebut mulai meredam ketegangan, tantangan struktural dan kultural masih mengemuka. **Kesimpulan:** Konflik sosial akibat pemindahan ibu kota mencerminkan adanya ketimpangan sosial-politik yang lebih dalam dan kelemahan dalam tata kelola transisi. Meski konflik belum sepenuhnya reda, keterlibatan aktif lembaga lokal seperti Kesbangpol menunjukkan potensi dalam membangun rekonsiliasi sosial dan transisi yang lebih inklusif. **Kata kunci:** Banjarbaru, Dinamika Politik, Kebijakan Publik, Konflik Sosial, Partisipasi Masyarakat, Pemindahan Ibu Kota, Ralf Dahrendorf

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat sosial merupakan hubungan dan interaksi antara individu atau kelompok dalam suatu komunitas yang dibentuk melalui norma, nilai, dan kebudayaan (Soekanto, 2009). Masyarakat berperan sebagai tempat bertukar informasi, pendukung emosional, serta ruang untuk saling membantu dan berkolaborasi. Interaksi tersebut membentuk struktur sosial yang mengatur pola hubungan manusia, menciptakan koordinasi dan keterikatan emosional. Struktur sosial juga menggambarkan bagaimana masyarakat terorganisasi berdasarkan kelas sosial, gender, dan etnisitas, serta sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan

Struktur sosial masyarakat Indonesia tergolong kompleks, di mana terdapat kelompok-kelompok sosial dengan status ekonomi yang beragam. Kelompok ekonomi menengah atas biasanya menguasai aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya, serta tinggal di kawasan perkotaan atau perumahan elit. Sebaliknya, kelompok ekonomi menengah ke bawah umumnya tinggal di pinggiran kota atau pedesaan, dan memiliki taraf hidup yang lebih rendah (Aris, 2021). Perbedaan status ini membentuk persepsi sosial yang beragam dan dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. (Hidayat et al, 2024)

Masyarakat yang tinggal di perkotaan memiliki latar belakang etnis, agama, pekerjaan, dan budaya yang lebih beragam. Kota sering menjadi tempat bertemunya berbagai kepentingan dan budaya, sehingga dinamika sosialnya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pedesaan (Indrayani, 2020). Di kota, perubahan sosial berlangsung lebih cepat karena masyarakatnya lebih terbuka terhadap perubahan (Heryansyah, 2018). Namun, keberagaman ini juga memicu persaingan dan ketegangan antarkelompok sosial (Gina, 2022).

Kota Banjarmasin merupakan kota besar di Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai "Kota Seribu Sungai" karena memiliki jaringan sungai yang luas dan menjadi pusat

perdagangan serta perekonomian provinsi. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dipindahkan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 16 Maret 2022 dan menyebutkan secara eksplisit bahwa ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. IKN dibangun di Kalimantan Timur sebagai alternatif pemindahan ibukota negara untuk menghindari jawa-sentris. Kalimantan dipilih sebagai alternatif karena memiliki daya tarik keterpilihan ibukota alternatif, maka pada sisi lain Jakarta kini memiliki daya tolak yang tinggi sebagai ibukota negara.

Pemindahan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain letak geografis Banjarbaru yang berada di tengah provinsi dan lebih mudah diakses dari berbagai daerah (Rachmawati, 2022), serta kemacetan lalu lintas yang cukup parah di Kota Banjarmasin yang menghambat aktivitas pemerintahan. Selain itu, Banjarbaru dinilai lebih memungkinkan untuk pengembangan infrastruktur pemerintahan karena memiliki wilayah yang lebih luas dan ketersediaan lahan yang lebih besar. Dari segi mitigasi bencana, Banjarbaru juga lebih aman dari risiko banjir dibandingkan Banjarmasin.

Meskipun memiliki banyak keunggulan secara administratif dan geografis, pemindahan ibu kota ini turut memunculkan konflik sosial di Kota Banjarbaru. Perubahan status sebagai ibu kota memicu pembangunan besar-besaran dan urbanisasi yang signifikan, yang kemudian mengubah struktur sosial masyarakat setempat. (Anzor *et al*, 2024). Banjarbaru menjadi pusat konsentrasi penduduk baru dan proyek pembangunan yang menyebabkan tekanan terhadap masyarakat lokal, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun akses ruang hidup (Madya & Prastowo, 2023).

Konflik vertikal terjadi antara masyarakat dan pemerintah sebagai akibat dari proses pemindahan ini, terutama bagi masyarakat lokal yang merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, konflik horizontal muncul sebagai dampak dari masuknya pendatang dan pembangunan pemukiman yang tidak merata. Ketimpangan dalam akses terhadap lahan, fasilitas umum, dan ruang sosial menimbulkan kecemburuan sosial antarkelompok ekonomi (Saputra dkk., 2023).

Ketersediaan lahan yang masih luas di Banjarbaru membuka peluang persaingan dalam pembelian dan pemanfaatan lahan. Kelompok ekonomi menengah ke atas memiliki kemampuan untuk membeli lahan di lokasi strategis, sementara kelompok ekonomi bawah terpaksa berpindah ke pinggiran kota yang minim fasilitas dasar seperti air bersih dan ruang terbuka hijau (Helmi, 2022). Hal ini memperbesar risiko konflik sosial yang berkepanjangan.

Selain itu, konflik juga dapat dipicu oleh perbedaan pandangan budaya dan politik. Sebagian kelompok mendukung pemindahan ibu kota karena dinilai mampu meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, namun sebagian lainnya menolaknya karena merasa pemindahan tersebut mengancam identitas budaya lokal dan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat (Madya & Prastowo, 2023). Apabila tidak dikelola dengan baik, konflik ini berpotensi menjadi demonstrasi, aksi penolakan, bahkan benturan fisik.

Konflik sosial dalam pemindahan ibu kota ini mencerminkan bahwa persoalan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut dinamika sosial yang kompleks dan berlapis. (Nihayah *et al*, 2025). Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta. Kekhawatiran masyarakat atas dampak negatif seperti penggusuran, hilangnya mata pencaharian, serta perubahan sosial budaya

menjadi pemicu utama (Putra,2023)

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis memilih Kota Banjarbaru sebagai lokasi penelitian karena menjadi pusat transformasi sosial yang paling terdampak dari pemindahan ibu kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika konflik sosial yang muncul di tengah masyarakat Kota Banjarbaru, serta meneliti pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, khususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dalam menangani konflik yang terjadi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru telah menimbulkan perubahan besar dalam struktur pemerintahan, tata ruang, serta dinamika sosial di wilayah terdampak. Meskipun kebijakan ini secara yuridis telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, realitas sosial yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya memperhitungkan dampak sosiologis yang ditimbulkan terhadap masyarakat lokal. Salah satu kesenjangan utama dalam konteks ini adalah minimnya kajian akademik dan kebijakan yang secara spesifik mengidentifikasi dan menangani dinamika konflik sosial yang muncul akibat pemindahan ibu kota, terutama yang terjadi di tingkat lokal seperti di Kota Banjarbaru.

Selama ini, sebagian besar pembahasan dan pemberitaan mengenai pemindahan ibu kota lebih banyak berfokus pada aspek administratif, infrastruktur, dan kesiapan lahan, namun luput dalam memperhatikan konsekuensi sosial dan budaya yang dialami masyarakat secara langsung, khususnya kelompok rentan seperti warga lokal berpenghasilan rendah, masyarakat adat, dan pelaku usaha kecil. Hal ini menciptakan celah implementasi kebijakan, di mana pembangunan fisik berlangsung cepat, tetapi belum diiringi dengan mitigasi sosial yang memadai.

Selain itu, kajian yang menyoroti konflik sosial dalam konteks pemindahan ibu kota provinsi di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti konflik sosial dalam konteks agraria, politik, atau etnisitas secara umum, bukan dalam konteks pergeseran pusat pemerintahan. Padahal, pemindahan ibu kota mengandung dinamika kekuasaan dan distribusi sumber daya yang berdampak langsung terhadap struktur sosial masyarakat lokal. Ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang penting untuk dijawab agar kebijakan pemindahan ibu kota dapat dilaksanakan secara lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesenjangan lainnya terletak pada minimnya dokumentasi sistematis mengenai pendekatan dan strategi resolusi konflik sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh lembaga seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Padahal, lembaga ini memiliki mandat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memediasi ketegangan antar kelompok masyarakat. Kurangnya data, panduan teknis, dan evaluasi kebijakan yang mendalam terhadap peran lembaga ini dalam konteks pemindahan ibu kota, menjadi penghambat dalam memahami efektivitas dan tantangan nyata di lapangan.

Tak hanya itu, pemetaan kategori konflik sosial di Banjarbaru belum dikaji secara holistik dan interdisipliner. Meskipun telah terjadi konflik ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan budaya, belum ada studi yang menyusun secara sistematis akar konflik, aktor yang terlibat, hingga dampaknya terhadap integrasi sosial dan tata kelola lokal. Kekosongan inilah yang coba dijawab dalam penelitian ini, untuk memberikan kerangka konseptual dan praktis yang dapat

digunakan pemerintah daerah dalam merespons dinamika sosial secara lebih sensitif dan solutif.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang relevan dan penting karena mengisi celah pengetahuan tentang bagaimana konflik sosial berkembang dalam konteks pemindahan ibu kota provinsi, dan bagaimana strategi penanganan konflik oleh pemerintah daerah dapat diperkuat melalui pendekatan kebijakan yang berbasis lokal, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu konflik sosial yang muncul akibat pemindahan ibu kota, baik pada skala nasional maupun provinsi, dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan. Madya & Prastowo (2023) juga mengkaji kerentanan konflik sosial di wilayah pembangunan IKN. Menggunakan teori konflik dari Lewis A. Coser, penelitian ini mengkategorikan konflik sosial menjadi konflik realistik dan non-realistik. Temuannya menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat lokal dan pendatang berpotensi terjadi dan tidak boleh diabaikan. Penelitian ini sejalan dalam mengangkat isu konflik sosial akibat pemindahan ibu kota, namun perbedaannya terletak pada fokus area kajian yang ditujukan pada skala nasional dan tidak menyoroti pendekatan penyelesaian di tingkat lokal seperti peran Kesbangpol.

Penelitian oleh Nurhemaya dan Sugangga (2021) dalam *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia* berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Dengan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif), penelitian ini menyimpulkan adanya kelompok yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa pemindahan ibu kota memunculkan reaksi sosial yang beragam, namun berbeda dalam pendekatan metodologis karena penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Saputra et al. (2023) dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* meneliti dampak pemindahan ibu kota negara terhadap aspek sosial dan ekonomi di Kalimantan Timur. Penelitian ini menyoroti bahwa pemindahan ibu kota berpotensi memunculkan ketimpangan sosial dan perubahan struktur masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus isu, di mana menekankan pada aspek ekonomi makro dan sosial secara umum, sementara penelitian ini mendalami dinamika konflik sosial secara spesifik di level komunitas.

Penelitian oleh Rakhmat Hidayat (2023) mengkaji konflik agraria masyarakat adat akibat pemindahan IKN menggunakan pendekatan ekologi politik kritis. Temuannya menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara dapat menyebabkan konflik lahan, terutama di wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat. Penelitian ini memperlihatkan persamaan dalam konteks pemindahan ibu kota sebagai pemicu konflik, namun berbeda fokus karena penelitian ini lebih luas mencakup spektrum konflik sosial, bukan hanya agraria.

Putra (2023) meneliti dampak pemindahan ibu kota terhadap masyarakat adat. Dengan metode normatif-deskriptif, penelitian ini menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat yang terdampak pembangunan IKN. Meski memiliki titik temu dalam membahas potensi konflik, penelitian ini lebih menyoroti aspek hak-hak masyarakat adat secara spesifik, sedangkan penelitian ini melihat konflik dari berbagai dimensi sosial masyarakat umum.

Saraswati dan Adi (2022) dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* menggunakan analisis SWOT untuk mengkaji kebijakan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki kekuatan dan peluang besar bagi pembangunan nasional. Persamaannya terletak pada konteks kebijakan pemindahan ibu kota, namun berbeda dalam fokus pembahasan karena penelitian ini mengkaji strategi dan implementasi kebijakan, bukan dampak sosial yang ditimbulkan.

Farida & Bagus (2023) membahas dampak pemindahan ibu kota Kabupaten Kerinci terhadap perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dan menunjukkan bahwa pemindahan dapat membawa dampak positif bila didukung oleh kebijakan yang tepat. Penelitian ini memperlihatkan sisi perkembangan dan peluang, berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan konflik sosial dan respon pemerintah.

Putra (2023) mengkaji dampak positif dan negatif pemindahan IKN menggunakan pendekatan kualitatif dengan triangulasi data sekunder dan primer. Hasil penelitian menekankan perlunya efektivitas anggaran dan mitigasi risiko sosial. Penelitian ini memiliki relevansi dalam hal melihat dampak menyeluruh dari kebijakan pemindahan, namun tidak mengulas dinamika konflik secara mendalam.

Putrayasa et al. (2024) dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* menganalisis dampak pemindahan ibu kota terhadap tata kelola pemerintahan dan pembentukan otorita baru. Penelitian ini membahas aspek kelembagaan dan ketatanegaraan yang terdampak, berbeda dengan fokus penelitian ini yang menyoroti konflik sosial di level masyarakat bawah dan respon Kesbangpol terhadap dinamika tersebut.

Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan dasar teoritik dan temuan awal yang penting dalam memahami dampak sosial pemindahan ibu kota. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian yang secara khusus mengkaji konflik sosial yang terjadi pada level lokal dalam pemindahan ibu kota provinsi, serta belum banyak yang mengevaluasi pendekatan penyelesaian konflik oleh institusi pemerintah daerah secara langsung, seperti yang akan dilakukan dalam penelitian ini di Kota Banjarbaru.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dalam kajian konflik sosial, khususnya pada konteks pemindahan ibu kota provinsi di tingkat lokal, yang selama ini masih kurang dijadikan fokus utama dalam penelitian-penelitian terdahulu. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang membahas pemindahan ibu kota negara dan dampaknya secara makro (nasional), penelitian ini secara spesifik meneliti dampak sosial di tingkat kota dengan menyoroti dinamika konflik yang muncul di Kota Banjarbaru sebagai ibu kota baru Provinsi Kalimantan Selatan.

Salah satu kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada pendekatan spesifik terhadap pemetaan konflik sosial secara sistematis berdasarkan kategori konflik, pihak yang terlibat, penyebab, dan dampaknya. Penelitian seperti Madya & Prastowo (2023) memang telah mengidentifikasi adanya konflik sosial dalam proses pemindahan ibu kota, tetapi belum menyusun klasifikasi konflik secara komprehensif seperti dalam penelitian ini, yang membagi konflik menjadi aspek ekonomi, sosial, politik, lingkungan, budaya, infrastruktur, ASN, pendidikan, transportasi, dan kesehatan secara detail dan terstruktur.

Selain itu, kebaruan lain yang diangkat adalah pada fokus terhadap peran pemerintah

daerah khususnya Kesbangpol Kota Banjarbaru dalam merespons konflik sosial. Hampir seluruh penelitian terdahulu yang dikaji, seperti penelitian oleh Hidayat (2023), maupun Putrayasa dkk. (2024), tidak secara eksplisit meneliti bagaimana strategi resolusi konflik dijalankan oleh lembaga lokal dalam merespons gejolak sosial akibat kebijakan besar seperti pemindahan ibu kota. Dalam penelitian ini, pendekatan kelembagaan dan kebijakan Kesbangpol menjadi fokus utama, yang menjadikan studi ini memiliki nilai praktis dan aplikatif yang tinggi bagi pemerintah daerah.

Penelitian ini juga menjadi salah satu yang pertama menggunakan konteks Kota Banjarbaru sebagai studi kasus. Berbeda Gunawan Aji dkk. (2023) yang menyoroti Kalimantan Timur secara umum, penelitian ini memberikan kontribusi lokasi baru dalam peta riset pemindahan ibu kota di Indonesia, khususnya pada tingkat provinsi, yang sebelumnya belum banyak dijelajahi dalam literatur ilmiah.

Dari sisi metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggabungkan studi fenomenologis dan studi kasus, yang memungkinkan peneliti menggali lebih dalam pengalaman sosial, psikologis, dan budaya masyarakat lokal yang terdampak. Hal ini membedakan penelitian ini dari studi seperti Saraswati & Adi (2022) yang hanya mengkaji pemindahan ibu kota menggunakan analisis SWOT secara makro atau penelitian kuantitatif berbasis persepsi seperti yang dilakukan Nurhemaya & Sugangga (2021).

Kebaruan lain juga terletak pada penggunaan triangulasi narasumber dari pemerintah, masyarakat, hingga media dokumentasi lokal, yang memungkinkan analisis yang lebih berimbang antara kebijakan dan respons warga. Penelitian lain seperti oleh Satriyati (2023) hanya mengandalkan data sekunder dan wawancara umum, tanpa fokus mendalam pada aktor penyelesaian konflik seperti Kesbangpol.

Sementara beberapa penelitian seperti oleh Farida & Bagus (2023) atau Hidayat (2023) lebih memfokuskan pada konflik agraria atau masyarakat adat, penelitian ini tidak terbatas pada isu lahan atau budaya, melainkan melihat konflik sosial dalam kerangka yang lebih luas dan kontekstual, yang mencakup semua lapisan masyarakat perkotaan.

Terakhir, penelitian ini memperkenalkan kerangka analisis konflik sosial lokal dalam pemindahan ibu kota provinsi yang bisa direplikasi di wilayah lain, dan sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan lokal berbasis realitas masyarakat yang bisa diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya dalam menghadapi transisi besar akibat relokasi pusat pemerintahan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika konflik sosial akibat pemindahan ibu kota provinsi di Kota Banjarbaru

II. METODE

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggali secara mendalam dinamika konflik sosial yang terjadi akibat pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk konflik yang muncul di masyarakat serta menganalisis respons dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarbaru. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi faktual di lapangan, proses sosial yang berlangsung, serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan ibu kota yang dinilai

membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial mereka.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarbaru, Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru, serta beberapa wilayah permukiman dan komunitas masyarakat yang terdampak langsung oleh pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan mengunjungi lokasi-lokasi tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang lebih representatif mengenai kondisi sosial nyata di lapangan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota.

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan, yaitu dari tanggal 6 sampai 25 Januari 2025, memberikan waktu yang cukup bagi peneliti untuk melakukan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi yang dibutuhkan guna memperoleh data yang valid, komprehensif, dan mendalam.

Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara menyeluruh dinamika sosial yang terjadi di Kota Banjarbaru, termasuk ketegangan antara kelompok masyarakat lokal dengan pendatang, serta antara masyarakat dengan lembaga pemerintahan. Metode ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial yang terjadi selama proses penelitian. Menurut Nurdin dan Hartati (2019:42), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek secara alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Hal ini sejalan dengan pendapat Simangunsong (2017:190) yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif dapat beradaptasi dengan perubahan informasi yang terjadi di lapangan, sehingga relevan digunakan dalam studi sosial dinamis seperti konflik masyarakat.

Penelitian ini melibatkan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan tingkat relevansi dan keterlibatan mereka dalam isu konflik sosial di Kota Banjarbaru. Informan utama meliputi Kepala Kesbangpol Kota Banjarbaru, pejabat Kesbangpol yang menangani bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, tokoh masyarakat lokal, serta warga yang terdampak langsung oleh pemindahan ibu kota. Pemilihan informan dilakukan karena mereka memiliki informasi kunci baik dari sisi kebijakan maupun dari perspektif sosial di tingkat akar rumput. Tokoh masyarakat dipilih karena mereka menjadi penghubung langsung antara warga dengan pemerintah, sedangkan warga terdampak dipilih untuk memberikan pandangan faktual mengenai perubahan sosial yang mereka alami sejak pemindahan ibu kota.

Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan secara selektif, yakni mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam isu konflik sosial akibat pemindahan ibu kota. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan format semi-terstruktur agar memungkinkan eksplorasi naratif dari para informan. Selain itu, observasi lapangan dilakukan di beberapa titik strategis seperti wilayah pemukiman warga lama dan kawasan pembangunan baru untuk mengamati tanda-tanda ketegangan atau perubahan sosial. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data sekunder melalui berita, arsip kebijakan, serta laporan instansi terkait.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting yang relevan dengan fokus konflik sosial. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi analitis dan matriks konflik. Kesimpulan ditarik secara bertahap dengan melakukan verifikasi silang terhadap temuan lapangan dan dokumen yang diperoleh. Teknik ini dipilih karena mampu mengorganisasi data sosial yang kompleks secara sistematis, serta memungkinkan

peneliti untuk membangun pemahaman yang utuh terhadap dinamika konflik dan langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah dalam meresponsnya.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan deskripsi yang komprehensif mengenai dinamika konflik sosial akibat pemindahan ibu kota serta kontribusi nyata dalam merancang pendekatan kebijakan berbasis lokal yang efektif dan berkelanjutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

DINAMIKA KONFLIK SOSIAL DALAM PEMINDAHAN IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI KOTA BANJARBARU

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6–25 Januari 2025 di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis dinamika konflik sosial yang muncul akibat pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori konflik sosial dari Ralf Dahrendorf (1896) yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu otoritas, kepentingan kelompok, dan kelompok konflik,

3.1 Dimensi Otoritas

Dalam teori konflik sosial yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf (1896). Konflik terjadi ketika terdapat ketimpangan otoritas antara kelompok yang memiliki kekuasaan (otoritatif) dan kelompok yang tidak (subordinat). Dalam konteks pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, ketimpangan ini terlihat jelas. Pemerintah provinsi bertindak sebagai aktor dominan yang menentukan arah kebijakan, sementara masyarakat terdampak merasa tidak diberi ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan.

Hasil wawancara dengan Bapak Amran, tokoh masyarakat dari Kelurahan Guntung Manggis, pada 15 Januari 2025, mempertegas ketimpangan tersebut. Ia menyatakan bahwa masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam keputusan penting mengenai pemindahan ibu kota. Bahkan ketika terjadi aksi protes kecil di depan DPRD, suara mereka tetap tidak digubris oleh otoritas. Situasi ini menunjukkan adanya hubungan vertikal yang timpang antara pemerintah sebagai pengambil keputusan dan masyarakat sebagai penerima dampak.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Dr. Nurlia Sari, M.Si, dosen Sosiologi FISIP ULM, yang menyatakan bahwa konflik sosial dalam kasus ini mencerminkan struktur kekuasaan yang tidak terbuka terhadap partisipasi publik. Ia menegaskan bahwa jika masyarakat tidak diberi ruang konsultasi yang bermakna, maka resistensi bisa berkembang dalam bentuk konflik laten yang sulit dikendalikan. Resistensi tersebut bisa muncul secara simbolik, verbal, bahkan dalam bentuk aksi sosial.

Dukungan atas temuan ini juga diperoleh dari data sekunder dalam berita media daring seperti Detik.com dan Kompas.com, yang melaporkan adanya penolakan dari warga Banjarmasin terhadap keputusan pemindahan ibu kota. Mereka menganggap keputusan tersebut dilakukan sepihak dan tidak mencerminkan aspirasi publik secara luas.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik sosial dalam pemindahan ibu kota ini terjadi karena ketimpangan dalam struktur otoritas, di mana kelompok subordinat merasa kehilangan kontrol atas kebijakan yang secara langsung berdampak pada kehidupan

mereka. Sesuai dengan pandangan Dahrendorf(1896), konflik semacam ini tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif. Solusi jangka panjangnya memerlukan redistribusi kekuasaan melalui partisipasi publik yang nyata, transparansi kebijakan, dan keterbukaan pemerintah dalam membangun dialog bersama masyarakat.

3.2 Dimensi Kepentingan Kelompok

Dalam teori konflik sosial Ralf Dahrendorf (1896) dimensi kepentingan kelompok menjadi salah satu aspek penting dalam memahami mengapa konflik muncul dan terus berkembang dalam masyarakat. Konflik tidak hanya terjadi karena perbedaan posisi dalam struktur kekuasaan, tetapi juga karena benturan kepentingan antara kelompok yang dominan dan subordinat. Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru memperlihatkan dinamika konflik yang kuat pada aspek ini.

Kelompok dominan seperti pemerintah provinsi, pengusaha besar, dan investor memiliki kepentingan untuk mempercepat proses pemindahan ibu kota dengan alasan efisiensi birokrasi, perluasan infrastruktur, serta peningkatan nilai ekonomi kawasan. Bagi mereka, kebijakan ini adalah bentuk modernisasi dan pemerataan pembangunan. Sementara itu, masyarakat lokal terutama pelaku UMKM, warga berpenghasilan rendah, dan penduduk Banjarmasin memiliki kepentingan mempertahankan kondisi sosial dan ekonomi yang selama ini telah stabil. Mereka khawatir akan kehilangan akses terhadap fasilitas publik, lahan usaha, dan mata pencaharian yang selama ini menopang hidup mereka.

Dalam wawancara pada tanggal 18 Januari 2025, Bapak H. Rizal, seorang pemilik warung makan di Kelurahan Loktabat Banjarbaru, menyampaikan bahwa meskipun ia menyambut baik geliat pembangunan di kotanya, kenyataan yang ia hadapi justru jauh dari harapan. Ia mengatakan bahwa persaingan usaha semakin ketat karena masuknya pelaku usaha besar dari luar daerah. Ditambah lagi, belum ada bentuk pendampingan atau dukungan nyata dari pemerintah kepada pelaku usaha kecil seperti dirinya. Sosialisasi hanya dilakukan melalui spanduk atau media, bukan melalui pendekatan dialog yang langsung menyentuh pelaku usaha di lapisan bawah.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemindahan ibu kota telah menciptakan situasi ketimpangan kepentingan yang tajam, di mana kelompok yang memiliki akses terhadap informasi, sumber daya, dan jaringan kekuasaan memperoleh keuntungan, sementara kelompok kecil seperti pelaku UMKM justru menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang meningkat. Ini memperkuat postulat Dahrendorf (1896) bahwa struktur sosial menciptakan kepentingan yang bertentangan secara *inheren* antara kelompok otoritatif dan kelompok subordinat.

Dr. Nurlia Sari, M.Si, Dosen Sosiologi FISIP ULM, dalam wawancara tanggal 16 Januari 2025, juga menyatakan bahwa konflik dalam pemindahan ibu kota ini merupakan refleksi dari distribusi kepentingan yang tidak merata. Menurutnya, kelompok yang berada di pusat otoritas tidak hanya mengendalikan kebijakan, tetapi juga membentuk struktur sosial dan ekonomi yang menguntungkan mereka. Ketika pembangunan hanya berorientasi pada investor, pengembang, dan kelompok elite, maka masyarakat terdampak yang tidak mendapatkan akses yang sama akan merasa teralienasi. Dalam konteks ini, konflik tidak sekadar menjadi bentuk penolakan, tetapi juga simbol keterasingan kelompok subordinat terhadap arah pembangunan yang tidak mereka pahami dan tidak mereka rasakan manfaatnya.

Bahkan ketika pemerintah telah berupaya memberikan kompensasi berupa ganti rugi lahan dan bantuan relokasi, kebijakan tersebut masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Banyak warga merasa bahwa nilai ganti rugi tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam konteks ini mengingatkan bahwa prinsip keadilan distributif harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik. Masyarakat yang paling terdampak seharusnya mendapatkan manfaat terbesar dan tidak boleh dibiarkan tertinggal oleh proses pembangunan.

Lebih jauh lagi, jika pendekatan kebijakan hanya fokus pada logika pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan aspek kepentingan kelompok minoritas atau marjinal, maka potensi konflik akan terus meningkat. Konflik antara kelompok penguasa dan kelas bawah bukan hanya soal distribusi ekonomi, tetapi juga menyangkut siapa yang mengontrol arah perubahan sosial dan siapa yang hanya menjadi objek dari perubahan itu sendiri. Dalam hal ini, pemindahan ibu kota yang diklaim sebagai “solusi pemerataan pembangunan” justru dapat memicu kesenjangan baru jika tidak disertai redistribusi akses, partisipasi, dan manfaat.

Dalam praktiknya, respons masyarakat terhadap kebijakan ini sangat beragam. Sebagian masyarakat Banjarbaru melihat pemindahan sebagai peluang, namun banyak yang mengeluh karena kurangnya keterlibatan mereka dalam perumusan kebijakan. Di sisi lain, masyarakat Banjarmasin melihat kebijakan ini sebagai bentuk “pengambilalihan simbolik” atas peran mereka sebagai pusat pemerintahan provinsi. Rasa kehilangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut identitas sosial dan sejarah panjang sebagai pusat kekuasaan daerah.

Oleh karena itu, konflik pada dimensi kepentingan kelompok ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknokratis. Pemerintah perlu melakukan pendekatan dialogis yang melibatkan semua kelompok terdampak secara setara, termasuk pelaku usaha kecil, komunitas lokal, dan masyarakat adat yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Strategi ini tidak hanya penting untuk meredam konflik, tetapi juga menjadi dasar bagi pembangunan yang benar-benar inklusif dan berkeadilan sosial.

3.3 Dimensi Kelompok Konflik

Dimensi Dimensi kelompok konflik dalam teori Ralf Dahrendorf (1896) menyoroti bagaimana pertentangan tidak hanya terjadi antarindividu, tetapi justru lebih tajam terjadi antar kelompok yang memiliki posisi berbeda dalam struktur sosial. Dalam konteks pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru, dinamika ini terlihat jelas dari munculnya fragmentasi sosial antara kelompok-kelompok yang merasa diuntungkan dan mereka yang merasa dirugikan. Kelompok-kelompok tersebut tidak hanya berbeda secara kepentingan, tetapi juga dalam hal akses terhadap kekuasaan, informasi, dan distribusi manfaat pembangunan.

Kelompok dominan dalam kasus ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kota Banjarbaru, serta para investor dan pengusaha besar yang memperoleh keuntungan langsung dari kebijakan pemindahan ibu kota. Mereka memiliki kontrol terhadap agenda pembangunan dan secara aktif terlibat dalam proses perencanaan, pemetaan tata ruang, serta pembangunan infrastruktur. Kelompok ini memegang posisi otoritatif dan mampu memengaruhi arah kebijakan melalui jejaring politik dan ekonomi.

Sebaliknya, kelompok subordinat meliputi masyarakat lokal Banjarbaru yang terancam

tergusur dari ruang sosialnya, masyarakat Banjarmasin yang kehilangan status simbolik sebagai ibu kota provinsi, serta pelaku usaha kecil dan menengah yang menghadapi tekanan persaingan baru. Kelompok ini tidak memiliki akses signifikan terhadap pengambilan keputusan dan lebih sering menjadi objek dari kebijakan pembangunan, bukan subjek yang terlibat dalam penyusunan atau evaluasinya.

Wawancara dengan Dr. Nurlia Sari, M.Si, Dosen Sosiologi FISIP ULM, mengungkapkan bahwa konflik kelompok dalam kasus ini berakar pada ketimpangan distribusi peran dan kepentingan. Kelompok otoritatif cenderung membentuk struktur sosial dan ekonomi yang menguntungkan mereka, sementara kelompok subordinat harus menerima dampak kebijakan yang dirancang tanpa melibatkan mereka secara langsung. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal hanya mendapat informasi dalam bentuk sosialisasi satu arah tanpa ruang dialog timbal balik.

Hal senada disampaikan oleh Bapak H. Rizal, pemilik warung makan kecil di Banjarbaru, yang merasakan dampak masuknya pelaku usaha besar dari luar daerah sejak pemindahan ibu kota. Persaingan usaha yang semakin ketat, ditambah dengan kurangnya perlindungan atau intervensi dari pemerintah, menyebabkan pelaku usaha kecil seperti beliau kehilangan posisi tawar dan mengalami penurunan pendapatan. Ini mencerminkan bagaimana kelompok subordinat tidak hanya kehilangan akses ekonomi, tetapi juga posisi strategis dalam ekosistem sosial baru yang terbentuk.

Dalam perspektif Gramsci (1971), kondisi ini menunjukkan dominasi kelompok elite bukan hanya melalui kontrol ekonomi atau kebijakan, tetapi juga melalui dominasi wacana. Narasi tentang “pemerataan pembangunan” dan “pembaharuan tata kelola pemerintahan” secara hegemonik digunakan untuk membenarkan kebijakan relokasi, padahal dalam praktiknya narasi tersebut tidak sepenuhnya mewakili pengalaman masyarakat terdampak. Ketika narasi ini tidak menyentuh realitas konkret masyarakat kecil, maka terjadi apa yang disebut Gramsci sebagai hegemoni yang rapuh—yang berisiko menimbulkan perlawanan kultural.

Lewis Coser menambahkan bahwa konflik antarkelompok seperti ini dapat bersifat konstruktif jika dikelola melalui mekanisme sosial yang legal, demokratis, dan inklusif. Namun, jika tidak ada wadah partisipatif dan respons yang adil dari pihak otoritas, maka konflik berpotensi menjadi destruktif dan menciptakan fragmentasi sosial yang lebih dalam. Dalam kasus ini, absennya forum deliberatif yang terbuka memperbesar jurang ketidakpercayaan antara kelompok subordinat dengan kelompok yang berkuasa.

Selain itu, muncul pula konflik horizontal antar masyarakat, terutama antara warga lama Banjarbaru dan para pendatang baru yang datang seiring pembangunan ibu kota. Perbedaan dalam kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya antara kedua kelompok ini menimbulkan potensi friksi yang cukup tinggi, terutama dalam hal penguasaan lahan, akses kerja, dan integrasi sosial. Ketegangan ini menambah kompleksitas konflik yang sebelumnya lebih bersifat vertikal.

Dengan melihat ketegangan-ketegangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik sosial dalam pemindahan ibu kota tidak hanya melibatkan dua kutub, melainkan menciptakan struktur konflik multipolar: antara pemerintah dan masyarakat, antar pelaku ekonomi besar dan kecil, bahkan antar sesama warga. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup hanya dilakukan dengan pendekatan administratif dan kompensasi satu arah. Dibutuhkan pendekatan transformatif yang berorientasi pada pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan,

distribusi akses terhadap sumber daya, dan perlindungan terhadap kelompok yang selama ini termarjinalkan.

Jika konflik kelompok ini tidak dikelola secara serius, maka legitimasi kebijakan pemindahan ibu kota akan terus dipertanyakan, dan potensi ketegangan sosial dapat berlanjut dalam bentuk konflik laten yang sulit diurai. Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah, khususnya lembaga seperti Kesbangpol, menjadi sangat penting untuk menjembatani kepentingan antar kelompok, menciptakan ruang dialog horizontal, dan membangun kebijakan yang lebih responsif terhadap kompleksitas sosial yang terjadi di lapangan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru memunculkan konflik sosial yang nyata, baik secara vertikal antara masyarakat dan pemerintah, maupun secara horizontal antar kelompok masyarakat.

Penelitian ini juga menguatkan temuan Madya & Prastowo (2023) yang mengidentifikasi adanya konflik realistik antara masyarakat lokal dan pendatang dalam wilayah pemindahan ibu kota. Konflik yang terjadi di Banjarbaru bukan hanya dipicu oleh relokasi administratif, tetapi juga oleh gesekan sosial akibat masuknya pelaku ekonomi baru yang memperbesar ketimpangan antar masyarakat. Namun, berbeda dengan yang berfokus pada wilayah IKN secara nasional, penelitian ini memperkaya diskursus dengan menambahkan dimensi respon kelembagaan lokal, yaitu peran Kesbangpol, yang belum dibahas secara khusus dalam penelitian terdahulu tersebut.

Sebaliknya, penelitian ini menolak pendekatan kuantitatif dalam penelitian Nurhemaya dan Sugangga (2021) yang menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pemindahan ibu kota terbelah antara yang pro dan kontra tanpa menggali lebih dalam konteks sosial, budaya, dan kuasa yang memengaruhi sikap tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi sosial bukan hanya ekspresi persepsi individual, melainkan bersumber dari struktur kekuasaan yang timpang, minimnya ruang partisipasi, serta ketidakseimbangan distribusi manfaat.

Temuan dari Saputra et al. (2023) yang menekankan dampak sosial-ekonomi dalam pemindahan ibu kota juga diperkuat oleh penelitian ini, terutama dalam hal pergeseran struktur ekonomi masyarakat dan melemahnya pelaku usaha lokal. Namun, penelitian ini menambahkan konteks konflik antar kelompok, seperti pelaku UMKM dan pengusaha besar, yang lebih terfokus pada lapisan bawah masyarakat sebagai subjek utama dalam konflik sosial.

Berbeda dengan Rakhmat Hidayat (2023) yang menyoroti konflik agraria pada masyarakat adat dalam pemindahan IKN, penelitian ini tidak sepenuhnya menerima fokus tersebut karena tidak merepresentasikan dinamika masyarakat perkotaan seperti Banjarbaru. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik tidak semata soal agraria, melainkan lebih luas mencakup persoalan status kota, identitas sosial, distribusi akses ekonomi, dan fragmentasi antar warga lokal.

Penelitian oleh Putra (2023) yang menekankan pentingnya perlindungan masyarakat adat dalam pembangunan IKN dapat diterima sebagian, terutama dalam aspek perlunya perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan. Namun, penelitian ini menyempurnakan diskursus tersebut dengan menunjukkan bahwa tidak hanya masyarakat adat, tetapi juga warga kota, pelaku UMKM, dan kelompok miskin perkotaan berhak atas keadilan sosial dalam kebijakan pemindahan ibu kota.

Sementara itu, analisis SWOT oleh Saraswati dan Adi (2022) yang mengidentifikasi peluang dan kekuatan pemindahan ibu kota lebih berfokus pada aspek strategis tanpa membahas konflik yang ditimbulkan. Penelitian ini tidak sejalan dengan pendekatan tersebut, karena berdasarkan temuan lapangan, efek sosial dari pemindahan justru menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum potensi keberhasilan pembangunan dapat dicapai secara merata.

Penelitian oleh Farida & Bagus (2023) yang mengkaji dampak ekonomi dari pemindahan ibu kota kabupaten di Kerinci memang menunjukkan sisi positif bila didukung kebijakan tepat. Namun, penelitian ini menolak kecenderungan terlalu optimis tersebut, sebab dalam kasus Banjarbaru, kebijakan pemindahan justru menimbulkan resistensi sosial karena prosesnya dilakukan secara top-down tanpa keterlibatan masyarakat secara substansial.

Penelitian oleh Putra (2023) yang menggunakan pendekatan triangulasi data dalam mengkaji dampak sosial IKN memiliki kesamaan metodologis dengan penelitian ini, terutama dalam penggunaan data primer dan sekunder secara bersamaan. Penelitian ini menerima pendekatan tersebut, namun menambahkan fokus evaluatif terhadap peran pemerintah lokal dalam merespons konflik, sebuah aspek yang belum dijangkau oleh penelitian tersebut.

Akhirnya, penelitian oleh Putrayasa et al. (2024) yang membahas dampak pemindahan ibu kota terhadap tata kelola pemerintahan memberikan kontribusi dari aspek struktural administratif. Penelitian ini mengembangkan aspek tersebut dengan mengaitkannya secara langsung dengan peran kelembagaan lokal seperti Kesbangpol, dalam mengelola konflik sosial dan membangun kembali kepercayaan publik melalui pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kesamaan dengan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa pemetaan konflik yang lebih rinci, yaitu konflik dalam dimensi otoritas, kepentingan kelompok, dan kelompok konflik, serta penekanan pada pentingnya peran lembaga lokal seperti Kesbangpol. Penelitian ini juga menyoroti bahwa penyelesaian konflik sosial akibat pemindahan ibu kota tidak dapat dilakukan secara teknokratis semata, tetapi harus dilakukan melalui pendekatan sosiologis, partisipatif, dan sensitif terhadap konteks lokal masyarakat yang terdampak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, serta dengan menggunakan teori konflik sosial Ralf Dahrendorf (1896) sebagai kerangka analisis utama, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

Pemindahan ibu kota provinsi telah menciptakan berbagai bentuk konflik sosial yang terbagi ke dalam tiga dimensi utama, yaitu dimensi otoritas, dimensi kepentingan kelompok, dan dimensi kelompok konflik. Pada dimensi otoritas, ditemukan adanya relasi kekuasaan yang timpang antara pemerintah (sebagai otoritas pengambil kebijakan) dan masyarakat terdampak (sebagai kelompok subordinat). Keputusan yang dilakukan secara top-down tanpa pelibatan publik yang memadai telah memunculkan resistensi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses relokasi.

Dalam dimensi kepentingan kelompok, konflik terjadi karena perbedaan tujuan antara

kelompok dominan seperti pemerintah, pengusaha besar, dan investor yang berorientasi pada pembangunan dan ekspansi ekonomi, dengan kelompok subordinat seperti pelaku UMKM, masyarakat lokal Banjarbaru, dan warga Banjarmasin yang merasa kehilangan akses terhadap ekonomi, status kota, dan identitas sosial. Ketimpangan kepentingan ini semakin diperparah oleh minimnya ruang partisipasi dalam perumusan kebijakan.

Sementara itu, pada dimensi kelompok konflik, penelitian ini menemukan adanya fragmentasi sosial antara kelompok penguasa dan kelompok terdampak, serta konflik horizontal antar warga lokal dan pendatang. Proses pemindahan ibu kota tidak hanya menimbulkan konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga memperlihatkan konflik antar kelompok ekonomi dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa proses pembangunan belum sepenuhnya inklusif dan responsif terhadap keragaman kepentingan sosial yang ada di lapangan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran lembaga lokal, khususnya Kesbangpol Kota Banjarbaru, sangat penting dalam meredam eskalasi konflik melalui pendekatan dialogis, deteksi dini, dan fasilitasi komunikasi antar kelompok. Namun, kapasitas kelembagaan dan integrasi lintas sektor dalam penyelesaian konflik masih perlu diperkuat agar mampu menjalankan fungsi mediasi secara lebih efektif.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu, cakupan wilayah, dan sumber data. Studi ini hanya dilakukan di Kota Banjarbaru sebagai lokasi penerima dampak pemindahan ibu kota, sehingga tidak mencakup wilayah lain seperti Kota Banjarmasin atau kabupaten sekitarnya yang juga terpengaruh. Selain itu, belum semua aktor seperti pejabat provinsi, investor, dan kelompok rentan lain berhasil diwawancarai secara langsung karena keterbatasan akses. Keterbatasan ini membuat analisis belum dapat menggambarkan dinamika konflik secara menyeluruh dari semua sisi kepentingan yang ada.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work) Penelitian lanjutan sangat disarankan untuk memperluas pemahaman mengenai dinamika konflik sosial dalam kebijakan pemindahan ibu kota di berbagai konteks wilayah. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara komparatif antara beberapa daerah, baik yang menjadi lokasi pemindahan maupun yang kehilangan status administratif, agar dapat mengidentifikasi pola umum maupun kekhasan konflik yang muncul. Selain itu, pendalaman terhadap strategi penyelesaian konflik oleh pemerintah daerah sangat diperlukan, termasuk evaluasi langsung terhadap efektivitas program-program Kesbangpol dalam mencegah dan meredam ketegangan sosial. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji penggunaan teknologi partisipatif dalam proses perencanaan kebijakan sebagai alternatif solusi untuk membangun kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan sosial.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarbaru beserta seluruh jajaran, yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dengan lancar.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih kepada para narasumber, masyarakat Kota Banjarbaru, dan semua pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan informasi yang sangat berharga untuk kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.

Tanpa bantuan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anzor, Karim, A. A., & Hertadi, C. D. P. (2024). The Effect of Relocation the Country's Capital on Poverty Rates Using System Dynamics (Case Study: Balikpapan City). *International Journal of Information Engineering and Electronic Business*, 16(3), 57–65. <https://doi.org/10.5815/ijieeb.2024.03.06>
- Aris. (2021). Struktur Sosial di Masyarakat: Klasifikasi, Jenis, Fungsi, & Unsur. *Www.Gramedia.Com*. <https://www.gramedia.com/literasi/struktur-sosial/>
- Dahrendorf, R. (1896). *Konflik dalam masyarakat: Sebuah analisa-kritik* Jakarta: Rajawali.
- Indrayani, E. (2020). E-Government Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia. Sumatra Barat: Penerbit: LPP Balai Insan Cendekia
- Farida, A. & Bagus, M. (2023). IMPLEMENTASI PARADIGMA GREEN CONSTITUTION DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA MENUJU SMART FOREST CITY. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 104–109. Retrieved from <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/21>
- Gina, F. V. (2022). Perbedaan Masyarakat yang Tinggal di Perkotaan dan Masyarakat yang Tinggal di Pedesaan. <https://bobo.grid.id/read/083457934/perbedaan-masyarakat-yang-tinggal-di-perkotaan-dan-masyarakat-yang-tinggal-di-pedesaan>
- Helmi, M. (2022). Tingginya Pertumbuhan Penduduk Banjarbaru Bisa Memicu Peningkatan Ekonomi. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com>
- Heryansyah, T. R. (2018). Perbedaan Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan dalam Kelompok Sosial | Sosiologi Kelas 11. <https://www.ruangguru.com>
- Hidayat, A., Sugiarto, L., Sulistianingsih, D., Ananta, B. R., & Syakur, M. A. A. (2024). Study of Regulatory and Institutional Framework for the Relocation of the National Capital in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(4), 1821–1880. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i4.13566>
- Hidayat, R. (2023). KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT ADAT DALAM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 140–151. Retrieved from <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/79>

- Madya, S. H., & Prastowo, F. R. (2023). JEJARING WACANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA: EKSPLORASI DATA YOUTUBE. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 7–11. Retrieved from <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/2>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Nihayah, D. M., Sundoro, F. M., & Maslulah, L. (2025). Spatial effects on air quality due to the capital city relocation. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1438(1), 12052. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1438/1/012052>
- Nurdin, M., & Hartati, N. (2019). *Pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial dan kebijakan*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Putra, I. F. M. (2023). URGENSI PENCIPTAAN RUANG PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG DEMOKRATIS DALAM PROYEK RELOKASI IBU KOTA NEGARA (IKN). *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 19–24. Retrieved from <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/4>
- Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C., & Debora, C. (2024). Dampak Pemindahan Ibu Kota Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Di Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(10), 643–654. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i2.3486>
- Rachmawati. (2022). Ini Alasan Ibu Kota Kalsel Dipindahkan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. <https://regional.kompas.com/>.
- Saputra, A. ., Liyana, C. I., Sempena, I. D., Mursyidin, & Baihaqi. (2023). KERENTANAN KONFLIK SOSIAL DI KAWASAN IBU KOTA NEGARA. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 61–64. Retrieved from <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/12>
- Saraswati, M. K., & Adi, E. A. W. (2022). Pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis SWOT. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3086>
- Satriyati, E. . (2023). OPTIMALISASI POTENSI MODAL BUDAYA NUSANTARA SEBAGAI INDUSTRI KREATIF PENDORONG DAYA SAING IBUKOTA BARU INDONESIA. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 167–170. Retrieved from <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/32>
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.